

ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Mustafa Hasbar *)

Abstract : Performance Finance area of regency and town in to South arch Sulawesi, measured with the storey;level of effectiveness and independence start the year 2005-2007. From 23 regency/town, pursuant to result analyse known by some regency which less be effective even at category is not effective or with the Monetary Ratio Efektifitas (EKD) gyrate from in > 60 - 79,21 % and enter in very low finance independence category (ratio KKD 1% up to 25%) and also enter in category of pattern of relation instruktif, namely role of central government more dominant than local government independence.

Keyword : Financial performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disetiap daerah perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi asas tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti. Berdasarkan perundangan ini, secara umum pada era ini wewenang Pemerintah Daerah telah terlihat secara nyata melalui definisi Pemda yang hanya meliputi Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya (tidak termasuk DPRD). Secara khusus telah terjadi pergeseran dalam pengelolaan APBD, yakni dalam akuntabilitas (dari akuntabilitas vertikal menjadi horizontal), penyusunan anggaran (dari proses tradisional menjadi proses penyusunan anggaran kinerja), pengendalian dan audit (dari pengendalian dan audit keuangan menjadi pengendalian dan audit keuangan dan kinerja), penerapan pusat pertanggungjawaban (dari tidak adanya pusat pertanggungjawaban menjadi adanya pusat pertanggungjawaban), dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (dari pembukuan menjadi akuntansi).

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan Otonomi Daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, kondisi di luar negeri menun-

jukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing tiap negara, termasuk daya saing Pemerintah Daerah ini di harapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian.

Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah tersebut, maka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hubungan dalam bidang keuangan, menjadi sesuatu yang wajib diubah. Dengan kata lain, reformasi dalam bidang hubungan keuangan dan daerah (reformasi keuangan daerah) menjadi isu yang cukup penting dan mendapat sorotan banyak pihak. Untuk mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campurtangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro (2004) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektifitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan. Cakupan penelitian yang dilakukan meliputi kemandirian dan efektifitas keuangan daerah tiap-tiap tahun dan kecenderungan/trend dari tahun ke tahun. Kecenderungan/trend kemandirian dan efektifitas keuangan ini perlu dilakukan karena mungkin saja tingkat kemandirian dan efektifitas keuangan kabupaten/kota pada tiap-tiap tahun belum menunjukkan persentase yang menggembirakan namun memiliki kecenderungan/trend arah perkembangan yang positif, sehingga dapat memacu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan daerah yang lebih komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini, yaitu : Bagaimana Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2007”.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2007.
- b. Manfaat penelitian adalah: a) Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memecahkan masalah keuangan, b) Sebagai bahan referensi untuk penulis yang selanjutnya akan melakukan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2002) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian. Pada penelitian ini yang digunakan adalah rasio kemandirian, dan rasio efektifitas, sedangkan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan keserasian tidak digunakan.

Otonomi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2002:167) adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

b. Rasio Keuangan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169).

1. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sondang P. Siagian (2006:24) memberikan definisi sebagai berikut: "Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sementara itu Abdurahmat (2008:92) "Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya".

Rasio efektifitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut "Rasio EKD") menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya., yang dapat diformulasikan (Halim, 2004:128) sebagai berikut :

dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

c. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-

sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

d. Pola Hubungan Pusat-Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.

4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

e. Trend Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Amin (2000) menyatakan bahwa persentase trend digunakan apabila ingin melihat perkembangan suatu perusahaan. Dalam menghitung persentase digunakan salah satu tahun sebagai tahun dasar. Apabila suatu tahun dipilih sebagai tahun dasar, maka data dalam tahun tersebut dinyatakan dengan angka seratus, yang artinya 100% dan data sejenis dalam tahun berikutnya dinyatakan dalam angka persentase dari data tahun dasar. Dari penjelasan ini maka trend kemandirian dan efektifitas keuangan dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100 \%$$

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD pada } t_0 + 1}{\text{EKD pada } t_0} \times 100 \%$$

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimulai pada bulan April sampai Juli 2010.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

- Observasi
- Interview
- Dokumentasi

C. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

- Data Kualitatif

- Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pem. Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

- Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

- Analisis Trend

- Data Kuantitatif

b. Sumber Data

- Data Primer
- Data Sekunder

D. Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa analisis rasio dan analisis trend.

- Analisis Rasio

Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kemandirian dan efektifitas keuangan sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Efektifitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektifitas keuangan daerah (Rasio EKD).

Perhitungan Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 3

Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005

KAB / KOTA	TARGET PAD	REALISASI PAD
Makassar	Rp 98.932.061.960	Rp 99.841.782.817,98
Bantaeng	Rp 6.139.924.000	Rp 5.709.532.702,64
Barru	Rp 10.096.737.678	Rp 7.888.060.286,80
Bone	Rp 20.578.632.000	Rp 17.234.557.313,73
Bulukumba	Rp 13.278.349.144	Rp 10.638.393.515,09
Enrekang	Rp 11.558.429.450	Rp 10.582.710.695,10

Gowa	Rp 23.081.364.641	Rp 21.156.143.945,83
Jeneponto	Rp 10.591.824.546	Rp 6.641.319.396,00
Kep. Selayar	Rp 6.781.360.000	Rp 6.409.498.795,09
Luwu	Rp 13.535.909.000	Rp 8.922.031.537,47
Luwu Timur	Rp 9.930.539.900	Rp 9.389.053.007,25
Luwu Utara	Rp 13.665.588.000	Rp 12.206.156.089,76
Maros	Rp 20.544.925.000	Rp 13.573.654.363,86
Palopo	Rp 13.829.521.017	Rp 13.359.287.440,92
Pangkep	Rp 28.156.499.016	Rp 29.593.952.054,83
Pare – Pare	Rp 17.176.063.000	Rp 18.880.252.604,96
Pinrang	Rp 13.448.046.378	Rp 12.026.727.209,25
Sidrap	Rp 19.707.240.400	Rp 13.978.017.663,38
Sinjai	Rp 14.028.674.454	Rp 11.724.572.896,70
Soppeng	Rp 6.709.499.464	Rp 6.876.125.679,32
Takalar	Rp 9.217.940.750	Rp 6.491.318.369,46
Tana Toraja	Rp 20.186.949.200	Rp 13.972.760.491,46
Wajo	Rp 17.403.794.835	Rp 21.046.710.366,74
TOTAL	Rp 418.579.873.833	Rp 378.142.619.243,62

Sumber : BPKD PROV. Sul-Sel,2010

Tabel 4

Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006

KAB. / KOTA	TARGET PAD	REALISASI PAD
Makassar	Rp 114.775.532.315,00	Rp 120.890.777.136,68
Bantaeng	Rp 9.303.696.196,11	Rp 9.151.539.511,11
Barru	Rp 10.543.300.020,00	Rp 13.099.511.706,77
Bone	Rp 25.937.213.000,00	Rp 21.134.931.130,12

Bulukumba	Rp 20.053.498.944,00	Rp 16.866.499.796,21
Enrekang	Rp 12.835.379.110,00	Rp 15.862.112.734,44
Gowa	Rp 27.999.779.493,00	Rp 35.703.518.160,67
Jeneponto	Rp 8.499.556.789,00	Rp 8.949.576.137,60
Kep. Selayar	Rp 10.965.250.000,00	Rp 9.915.532.671,03
Luwu	Rp 15.704.368.500,00	Rp 11.597.963.924,36
Luwu Timur	Rp 19.249.671.060,00	Rp 19.656.745.215,30
Luwu Utara	Rp 12.670.909.000,00	Rp 14.042.353.360,38
Maros	Rp 20.082.025.000,00	Rp 18.430.535.566,62
Palopo	Rp 16.425.813.358,00	Rp 15.496.226.593,27
Pangkep	Rp 35.431.487.891,00	Rp 36.477.704.604,00
Pare – Pare	Rp 21.245.049.000,00	Rp 23.820.081.429,00
Pinrang	Rp 17.611.947.678,00	Rp 19.413.598.388,31
Sidrap	Rp 25.860.456.000,00	Rp 19.575.731.211,44
Sinjai	Rp 12.899.381.374,00	Rp 17.090.905.776,64
Soppeng	Rp 7.764.902.747,00	Rp 11.014.982.412,36
Takalar	Rp 10.426.727.400,00	Rp 8.973.944.287,09
Tana Toraja	Rp 20.503.679.608,00	Rp 19.541.363.442,56
Wajo	Rp 20.084.593.960,00	Rp 24.775.904.850,69
TOTAL	Rp 496.874.218.443,11	Rp 511.482.040.046,65

Sumber : BPKD PROV. Sul-Sel,2010

Tabel 5
Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2007

KAB. / KOTA	TARGET PAD	REALISASI PAD
Makassar	Rp 125.936.173.075	Rp 136.626.469.086
Bantaeng	Rp 8.303.696.196	Rp 9.151.539.511
Barru	Rp 14.389.935.000	Rp 14.996.022.004
Bone	Rp 78.185.503.402	Rp 34.717.647.417
Bulukumba	Rp 22.544.912.455	Rp 20.068.934.162
Enrekang	Rp 16.671.671.639	Rp 18.713.309.296
Gowa	Rp 28.058.279.133	Rp 33.371.641.773
Jeneponto	Rp 13.456.503.000	Rp 10.971.860.402
Kep. Selayar	Rp 15.742.295.326	Rp 16.635.497.084
Luwu	Rp 16.930.300.000	Rp 12.972.465.595
Luwu Timur	Rp 32.637.061.162	Rp 38.120.016.000
Luwu Utara	Rp 15.441.878.000	Rp 15.326.209.259
Maros	Rp 25.067.075.000	Rp 23.710.810.330
Palopo	Rp 18.222.471.250	Rp 16.922.555.965
Pangkep	Rp 41.768.798.008	Rp 41.613.902.863
Pare – Pare	Rp 25.235.070.200	Rp 26.991.430.974
Pinrang	Rp 24.365.838.452	Rp 22.711.625.935
Sidrap	Rp 19.467.466.000	Rp 15.082.981.013
Sinjai	Rp 15.455.723.374	Rp 17.616.100.075
Soppeng	Rp 14.810.965.660	Rp 15.821.801.661
Takalar	Rp 12.087.650.400	Rp 11.046.201.645
Tana Toraja	Rp 24.134.768.274	Rp 20.703.403.626
Wajo	Rp 21.364.041.951	Rp 29.758.879.298
TOTAL	Rp 630.278.076.957	Rp 603.651.304.975

Sumber : BPKD PROV. Sul-Sel,2010

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah, maka diperoleh hasil Rasio EKD seperti terlihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)

No.	KAB / KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	92,99	98,36	110,21
2	Barru	78,12	124,24	104,21
3	Bone	83,75	81,48	44,40
4	Bulukumba	80,12	84,11	89,02
5	Enrekang	91,56	123,58	112,25
6	Gowa	91,66	127,51	118,94
7	Jeneponto	62,70	105,29	81,54
8	Kep. Selayar	94,52	90,43	105,67
9	Luwu	65,91	73,85	76,62
10	Luwu Timur	94,55	102,11	116,80
11	Luwu Utara	89,32	110,82	99,25
12	Makassar	100,92	105,33	108,49
13	Maros	66,07	91,78	94,59
14	Palopo	96,60	94,34	92,87
15	Pangkep	105,11	102,95	99,63
16	Pare - Pare	109,92	112,12	106,96
17	Pinrang	89,43	110,23	93,21
18	Sidrap	70,93	75,70	77,48
19	Sinjai	83,58	132,49	113,98
20	Soppeng	102,48	141,86	106,82
21	Takalar	70,42	86,07	91,38
22	Tana Toraja	69,22	95,31	85,78
23	Wajo	120,93	123,36	139,29

Sumber : Hasil Data Olahan

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Rasio EKD terendah , tahun 2005 adalah 62,70% (Kab. Jeneponto), tahun 2006 adalah 73,85% (Kab. Luwu), tahun 2007 adalah 44,40% (Kab. Bone).
2. Rasio EKD tertinggi tahun 2004 adalah 117 % (Kab. Wajo), tahun 2005 adalah 120% (Kab. Wajo), tahun 2006 adalah 141,86% (Kab. Soppeng), tahun 2007 adalah 139,29% (Kab. Wajo)

Sesuai Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti yang digambarkan pada tabel 1, maka peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sampai dengan 2007 dari rasio EKD yang dicapai seperti terlihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Peta Efektifitas Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	KAB / KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	Efektif	Efektif	Sangat Efektif

2	Barru	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
3	Bone	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Tidak Efektif
4	Bulukumba	Cukup Efektif	Cukup Efektif	Cukup Efektif
5	Enrekang	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
6	Gowa	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
7	Jeneponto	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Cukup Efektif
8	Kep. Selayar	Efektif	Efektif	Sangat Efektif
9	Luwu	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif
10	Luwu Timur	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
11	Luwu Utara	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif
12	Makassar	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
13	Maros	Kurang Efektif	Efektif	Efektif
14	Palopo	Efektif	Efektif	Efektif
15	Pangkep	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
16	Pare – Pare	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
17	Pinrang	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Efektif
18	Sidrap	Kurang Efektif	Kurang Efektif	Kurang Efektif
19	Sinjai	Cukup Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
20	Soppeng	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
21	Takalar	Kurang Efektif	Cukup Efektif	Efektif
22	Tana Toraja	Kurang Efektif	Efektif	Cukup Efektif
23	Wajo	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Data Olahan

Berdasarkan peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel 7 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Dari tahun 2005 sampai pada tahun 2007 hanya ada 2 kabupaten/ kota yang berada pada kategori sangat efektif yakni Kota Makassar dan Kab. Wajo atau realisasi PAD lebih dari 100% anggaran PAD. Sebaliknya, Kab. Luwu berada pada kategori kurang efektif atau realisasi PAD kurang dari 50% terhadap PAD yang dianggarkan.
2. Walaupun telah terdapat kabupaten/kota yang pencapaian efektifitasnya termasuk kategori kurang efektif dan tidak efektif, capaiannya masih fluktuatif kecuali 3 kab/kota (Kota Makassar, Kab. Wajo, dan Kab. Luwu). Artinya, satu kabupaten

dalam tahun tertentu tertentu mencapai kategori kurang efektif, tetapi tahun berikutnya meningkat ke kategori cukup efektif bahkan meningkat pada kategori sangat efektif, demikian juga bisa terjadi kondisi sebaliknya.

B. Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kemampuan keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD. Kemandirian keuangan daerah ini dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian atau rasio KKD.

Perhitungan Rasio Kemandirian (KKD) :

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 8
Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005

KAB / KOTA	PAD	DANA PERIMBANGAN
Makassar	Rp 99.841.782.817,98	Rp 411.094.900.016,00
Bantaeng	Rp 5.709.532.702,64	Rp 155.528.697.311,00
Barru	Rp 7.888.060.286,80	Rp 170.261.288.335,00

Bone	Rp 17.234.557.313,73	Rp 330.082.026.371,00
Bulukumba	Rp 10.638.393.515,09	Rp 229.011.297.372,00
Enrekang	Rp 10.582.710.695,10	Rp 175.355.289.128,00
Gowa	Rp 21.156.143.945,83	Rp 275.116.062.718,24
Jeneponto	Rp 6.641.319.396,00	Rp 197.272.225.918,00
Kep. Selayar	Rp 6.409.498.795,09	Rp 150.964.105.460,00
Luwu	Rp 8.922.031.537,47	Rp 207.906.123.630,00
Luwu Timur	Rp 9.389.053.007,25	Rp 159.120.675.591,00
Luwu Utara	Rp 12.206.156.089,76	Rp 165.162.779.883,00

Maros	Rp 13.573.654.363,86	Rp 209.508.060.912,17
Palopo	Rp 13.359.287.440,92	Rp 150.665.533.998,00
Pangkep	Rp 29.593.952.054,83	Rp 198.855.587.013,00
Pare – Pare	Rp 18.880.252.604,96	Rp 154.565.348.090,00
Pinrang	Rp 12.026.727.209,25	Rp 222.022.602.259,00
Sidrap	Rp 13.978.017.663,38	Rp 211.279.189.996,00
Sinjai	Rp 11.724.572.896,70	Rp 180.477.575.365,00
Soppeng	Rp 6.876.125.679,32	Rp 201.193.276.220,00
Takalar	R 6.491.318.369,46	Rp 184.210.129.922,16
Tana Toraja	Rp 13.972.760.491,46	Rp 249.650.674.545,00
Wajo	Rp 21.046.710.366,74	Rp 256.603.243.431,00
TOTAL	Rp 378.142.619.243,62	Rp 4.845.906.693.484,57

Sumber : BPKD, Prov Sul-Sel

Tabel 9

Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006

KAB./KOTA	PAD	DANA PERIMBANGAN
Makassar	Rp 120.890.777.137	Rp 619.958.299.314
Bantaeng	Rp 9.151.539.511	Rp 237.985.757.317
Barro	Rp 13.099.511.707	Rp 260.753.878.020
Bone	Rp 21.134.931.130	Rp 531.464.506.887
Bulukumba	Rp 16.866.499.796	Rp 309.120.398.002
Enrekang	Rp 15.862.112.734	Rp 272.848.861.239
Gowa	Rp 35.703.518.161	Rp 428.247.486.896
Jeneponto	Rp 8.949.576.138	Rp 308.425.130.272
Kep. Selayar	Rp 9.915.532.671	Rp 238.271.649.498
Luwu	Rp 11.597.963.924	Rp 329.792.866.756
Luwu Timur	Rp 19.656.745.215	Rp 318.418.807.052
Luwu Utara	Rp 14.042.353.360	Rp 306.891.205.138
Maros	Rp 18.430.535.567	Rp 323.893.720.220
Palopo	Rp 15.496.226.593	Rp 231.144.383.925
Pangkep	Rp 36.477.704.604	Rp 299.606.228.367
Pare – Pare	Rp 23.820.081.429	Rp 245.980.693.430
Pinrang	Rp 19.413.598.388	Rp 353.340.352.517
Sidrap	Rp 19.575.731.211	Rp 320.892.821.839
Sinjai	Rp 17.090.905.777	Rp 347.219.819.898
Soppeng	Rp 11.014.982.412	Rp 325.463.397.877
Takalar	Rp 8.973.944.287	Rp 292.359.756.378
Tana Toraja	Rp 19.541.363.443	Rp 395.958.939.174
Wajo	Rp 24.775.904.851	Rp 376.124.044.912
TOTAL	Rp 511.482.040.047	Rp 7.674.163.004.928

Sumber : BPKD Prov Sul-Sel, 2010

Tabel 10

Ringkasan Data Keuangan Kab. / Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

KAB./KOTA	PAD	DANA PERIMBANGAN
Makassar	Rp 136.626.469.086	Rp 701.452.339.401
Bantaeng	Rp 9.151.539.511	Rp 237.985.757.317
Barro	Rp 14.996.022.004	Rp 301.134.136.533
Bone	Rp 34.717.647.417	Rp 618.347.019.256
Bulukumba	Rp 20.068.934.162	Rp 422.957.816.792
Enrekang	Rp 18.713.309.296	Rp 359.799.907.804
Gowa	Rp 33.371.641.773	Rp 473.445.434.221
Jeneponto	Rp 10.971.860.402	Rp 351.594.792.962
Kep. Selayar	Rp 16.635.497.084	Rp 288.114.938.826
Luwu	Rp 12.972.465.595	Rp 379.520.419.441
Luwu Timur	Rp 38.120.016.000	Rp 372.150.287.335
Luwu Utara	Rp 15.326.209.259	Rp 370.369.747.246
Maros	Rp 23.710.810.330	Rp 383.020.406.894
Palopo	Rp 16.922.555.965	Rp 272.843.821.117
Pangkep	Rp 41.613.902.863	Rp 354.222.275.318
Pare – Pare	Rp 26.991.430.974	Rp 279.960.011.090
Pinrang	Rp 22.711.625.935	Rp 401.847.370.223
Sidrap	Rp 15.082.981.013	Rp 349.406.290.050
Sinjai	Rp 17.616.100.075	Rp 334.360.501.345
Soppeng	Rp 15.821.801.661	Rp 364.303.221.066
Takalar	Rp 11.046.201.645	Rp 345.448.625.195
Tana Toraja	Rp 20.703.403.626	Rp 448.881.561.046
Wajo	Rp 29.758.879.298	Rp 436.758.993.763

TOTAL	Rp 603.651.304.975	Rp 8.847.925.674.240
--------------	---------------------------	-----------------------------

Sumber : BPKD Prov. Sul-Sel, 2010

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh besaran rasio KKD seperti tampak pada tabel 11 berikut ini.

Tabel 11

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)

No.	KAB./KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	3,67	3,85	3,85
2	Barro	4,63	5,02	4,98
3	Bone	5,22	3,98	5,61
4	Bulukumba	4,65	5,46	4,74
5	Enrekang	6,04	5,81	5,20
6	Gowa	7,69	8,34	7,05
7	Jeneponto	3,37	2,90	3,12
8	Kep. Selayar	4,25	4,16	5,77
9	Luwu	4,29	3,52	3,42
10	Luwu Timur	5,90	6,17	10,24
11	Luwu Utara	7,39	4,58	4,14
12	Makassar	24,29	19,50	19,48
13	Maros	6,48	5,69	6,19
14	Palopo	8,87	6,70	6,20
15	Pangkep	14,88	12,18	11,75
16	Pare – Pare	12,22	9,68	9,64
17	Pinrang	5,42	5,49	5,65
18	Sidrap	6,62	6,10	4,32
19	Sinjai	6,50	4,92	5,27
20	Soppeng	3,42	3,38	4,34
21	Takalar	3,52	3,07	3,20
22	Tana Toraja	5,60	4,94	4,61
23	Wajo	8,20	6,59	6,81

Sumber : Hasil Data Olahan

Kemampuan keuangan daerah otonom dapat dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi tergantung kepada tingkat kemandirian keuangannya. Dari rasio KKD yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 11 di atas maka peta kemampuan keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikategorikan sebagai berikut.

Tabel 12

Peta Kemampuan Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	KAB./KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
2	Barro	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
3	Bone	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
4	Bulukumba	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
5	Enrekang	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
6	Gowa	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
7	Jeneponto	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
8	Kep. Selayar	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
9	Luwu	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
10	Luwu Timur	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
11	Luwu Utara	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
12	Makassar	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
13	Maros	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali
14	Palopo	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali

15	Pangkep	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	17	Pinrang	Instruktif	Instruktif	Instruktif
16	Pare – Pare	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	18	Sidrap	Instruktif	Instruktif	Instruktif
17	Pinrang	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	19	Sinjai	Instruktif	Instruktif	Instruktif
18	Sidrap	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	20	Soppeng	Instruktif	Instruktif	Instruktif
19	Sinjai	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	21	Takalar	Instruktif	Instruktif	Instruktif
20	Soppeng	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	22	Tana Toraja	Instruktif	Instruktif	Instruktif
21	Takalar	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali	23	Wajo	Instruktif	Instruktif	Instruktif
22	Tana Toraja	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali					
23	Wajo	Rendah Sekali	Rendah Sekali	Rendah Sekali					

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan pada 23 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sampai pada tahun 2007 berada dalam kategori rendah sekali atau kemampuan secara finansial berada di bawah 25%.

C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan seperti hasil rasio KKD pada tabel 11 maka mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001:168) seperti yang digambarkan pada tabel 2, dapat dipetakan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 13
Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	KAB/KOTA	2005	2006	2007
1	Bantaeng	Instruktif	Instruktif	Instruktif
2	Barru	Instruktif	Instruktif	Instruktif
3	Bone	Instruktif	Instruktif	Instruktif
4	Bulukumba	Instruktif	Instruktif	Instruktif
5	Enrekang	Instruktif	Instruktif	Instruktif
6	Gowa	Instruktif	Instruktif	Instruktif
7	Jeneponto	Instruktif	Instruktif	Instruktif
8	Kep. Selayar	Instruktif	Instruktif	Instruktif
9	Luwu	Instruktif	Instruktif	Instruktif
10	Luwu Timur	Instruktif	Instruktif	Instruktif
11	Luwu Utara	Instruktif	Instruktif	Instruktif
12	Makassar	Instruktif	Instruktif	Instruktif
13	Maros	Instruktif	Instruktif	Instruktif
14	Palopo	Instruktif	Instruktif	Instruktif
15	Pangkep	Instruktif	Instruktif	Instruktif
16	Pare – Pare	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Berdasarkan tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada pola instruktif, atau peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah secara finansial.

D. Trend Efektifitas Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Trend efektifitas keuangan daerah otonom menggambarkan kecenderungan arah perkembangan efektifitas keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar.

Perhitungan Trend EKD :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD pada } t0 + 1}{\text{EKD pada } t0} \times 100\%$$

Trend EKD Tahun 2006

Berdasarkan pada tabel 7 mengenai rasio efektifitas keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend EKD Tahun 2006 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD tahun 2006}}{\text{EKD tahun 2005}} \times 100\%$$

Trend EKD Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel 7 mengenai rasio efektifitas keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend EKD Tahun 2007 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{EKD tahun 2007}}{\text{EKD tahun 2006}} \times 100\%$$

Untuk Rasio EKD daerah otonom di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Dari

perhitungan rasio EKD pada tabel 7, dengan tahun dasar 2005, maka trend efektifitas keuangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 adalah seperti tampak pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 14
Trend Efektifitas Keuangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)

No.	KAB/KOTA	2006	2007
1	Bantaeng	105,8	112,0
2	Barru	159,0	83,9
3	Bone	97,3	54,5
4	Bulukumba	105,0	105,8
5	Enrekang	135,0	90,8
6	Gowa	139,1	93,3
7	Jeneponto	167,9	77,4
8	Kep. Selayar	95,7	116,9
9	Luwu	112,0	103,8
10	Luwu Timur	108,0	114,4
11	Luwu Utara	124,1	89,6
12	Makassar	104,4	103,0
13	Maros	138,9	103,1
14	Palopo	97,7	98,4
15	Pangkep	97,9	96,8
16	Pare – Pare	102,0	95,4
17	Pinrang	123,3	84,6
18	Sidrap	106,7	102,4
19	Sinjai	158,5	86,0
20	Soppeng	138,4	75,3
21	Takalar	122,2	106,2
22	Tana Toraja	137,7	90,0
23	Wajo	102,0	112,9

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Beberapa kabupaten/kota pada tahun 2007 telah terjadi perkembangan EKD dengan memiliki trend efektifitas keuangan statis di atas 100% dengan tahun dasar 2005, seperti: Bantaeng, Bulukumba, Luwu, Luwu Timur, Takalar, Wajo.
2. Beberapa kabupaten/kota pada tahun 2007 memiliki trend efektifitas keuangan menurun dengan tahun dasar 2005, seperti: Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu Utara, Pangkep, Palopo, Pare-Pare, Pinrang, dan Soppeng.

E. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Trend kemandirian keuangan daerah otonom menggambarkan

kecenderungan arah perkembangan kemandirian keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan tahun dasar.

Perhitungan Trend KKD :

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0 + 1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100\%$$

Trend KKD Tahun 2006

Berdasarkan pada tabel 13 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend KKD Tahun 2006 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{KKD tahun 2006}}{\text{KKD tahun 2005}} \times 100\%$$

Trend KKD Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel 13 mengenai rasio kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumus untuk menghitung Trend KKD Tahun 2007 yakni sebagai berikut :

$$\text{Trend EKD} = \frac{\text{KKD tahun 2007}}{\text{KKD tahun 2006}} \times 100\%$$

Untuk Rasio KKD daerah otonom di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dari perhitungan rasio KKD pada tabel 13, dengan tahun dasar 2005, maka trend kemandirian keuangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 adalah seperti tampak pada tabel 15 berikut ini.

Tabel 15
Trend Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan (dalam persen)

No.	KAB / KOTA	2006	2007
1	Bantaeng	104,90	100,00
2	Barru	108,42	99,20
3	Bone	76,25	140,95
4	Bulukumba	117,42	86,81
5	Enrekang	96,19	89,50
6	Gowa	108,45	84,53
7	Jeneponto	86,05	107,59
8	Kep. Selayar	97,88	138,70
9	Luwu	82,05	97,16
10	Luwu Timur	104,58	165,96
11	Luwu Utara	61,98	90,39
12	Makassar	80,28	99,90
13	Maros	87,81	108,79
14	Palopo	75,54	92,54
15	Pangkep	81,85	96,47
16	Pare – Pare	79,21	99,59
17	Pinrang	101,29	102,91
18	Sidrap	92,15	70,82

19	Sinjai	75,69	107,11
20	Soppeng	98,83	128,40
21	Takalar	87,22	104,23
22	Tana Toraja	88,21	93,32
23	Wajo	80,37	103,34

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Beberapa kabupaten/kota pada tahun 2007 memiliki trend kemandirian statis dengan dasar tahun 2005, seperti: Luwu Timur, Pinrang.
2. Dibandingkan dengan tahun dasar 2005, beberapa kabupaten/kota pada tahun 2005 memiliki trend kemandirian yang meningkat, kecuali: Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Pangkep, Sidrap, Sinjai, dan Tana Toraja. Sementara pada tahun 2006, trend kemandirian yang meningkat dialami oleh Bantaeng, Barru, Bulukumba, Gowa, Luwu Timur, dan Pinrang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut.

1. Pada daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih terdapat beberapa kabupaten yang kurang efektif bahkan pada kategori tidak efektif atau dengan Rasio Efektifitas Keuangan (EKD) berkisar dari di $>60\%$ - $79,21\%$.
2. Daerah Otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode tersebut masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sangat rendah (rasio KKD 1% sampai dengan 25%). Dan masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, yakni peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
3. Pada tahun 2007, dibandingkan dengan tahun dasar 2005, trend efektifitas keuangan daerah otonom

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat,. Kecuali pada beberapa kabupaten seperti Kabupaten Bone, Enrekang, Gowa, Jenepponto, Luwu Utara, Pangkep, Palopo, Pare-Pare, Pinrang dan Soppeng.

4. Trend kemandirian keuangan Luwu Timur, dan Kabupaten Pinrang arahnya sangat baik dengan trend kemandirian keuangan statis pada kisaran diatas 100% dengan dibandingkan kabupaten lain.
5. Pada tahun 2007, dibandingkan dengan tahun dasar 2005, trend kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan, yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah otonom kabupaten /kota di Provinsi Selatan dalam menyusun dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio dan trend kemandirian dan efektifitas keuangan daerah.
2. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
3. Pemerintah daerah otonom kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dwi, 2004, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.

- Baswir, Revrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* : BPFE : UMP AMP YPKN. *Straegi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S, 2004, *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Indonesia*. IAI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : BPF UGM.
- _____, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi
- Munawir, 2004, *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Liberty.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Straegi dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Prastowo, Dwi, 2005, *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : PT Rineka Cipta
- Prasetya, Gede, 2005, *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Richard Holloway, 2003. *Menuju Kemandirian Keuangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saragih. 2005. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- *) Dosen Tetap pada STIE **Nobel Indonsia** Makassar